

# **Pengaruh Hubungan Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan**

( Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan dan Keuangan Yang Terdaftar di BEI  
Tahun 2010-2012 )



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Progran Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:  
**Yudha Prawira**  
NIM. C2C008151

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2015**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Yudha Prawira  
Nomor Induk Mahasiswa : C2C008151  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi  
Judul Skripsi : **Pengaruh Hubungan Corporate  
Governance Terhadap Kinerja Keuangan**  
(Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan  
dan Keuangan Yang Terdaftar di BEI Tahun  
2010-2012)

Dosen Pembimbing : Dr. Haryanto S.E, M.Si., Akt.

Semarang, 1 April 2015  
Dosen Pembimbing,

(Dr. Haryanto S.E, M.Si., Akt.)  
NIP. 19741222 200012 1001

## PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama : Yudha Prawira  
Nomor Induk Mahasiswa : C2C008151  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi  
Judul Skripsi : **Pengaruh Hubungan Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan**  
(Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan dan Keuangan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2012 )

Tim penguji :

1. Dr Haryanto., SE., M.Si., Akt (.....)
2. Drs. Agustinus Santosa Adiwibowo, M.Si., Akt (.....)
3. Fuad SE., M.Si, Akt., Ph.D (.....)

## **PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya Yudha Prawira, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : Pengaruh Hubungan Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan ( Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan dan Keuangan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2012 ), adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik di sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah di berikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 1 April 2015  
Yang membuat pernyataan

Yudha Prawira  
C2C008151

## **ABSTRACT**

*This study examined the relationship of the Effect of Corporate Governance Financial Performance Against a case study on the financial company 'listed on the Stock Exchange in 2010-2012. The purpose of this study was to determine the effect of board size, the size of the independent directors, the size of the board of directors, managerial ownership on firm performance,*

*The population in this study were all financial companies listed on the Jakarta Stock Exchange (JSX) during the study period, ie 2010-2012. The sample in this study sample of 198 companies.*

*The results showed that the composition of the independent directors (having a positive influence on the performance of the company, the effect of board size positively on the performance of the company, the effect size of the board of directors is positively significant to the company's performance managerial ownership has a negative effect on the performance of the company.*

*Keywords: board size, the size of the independent directors, the size of the board of directors, managerial ownership, corporate performance*

## **ABTRAK**

Penelitian ini menguji tentang Pengaruh Hubungan *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan studi kasus pada perusahaan keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2012. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan komisaris, ukuran komisaris independen, ukuran dewan direksi, kepemilikan manajerial terhadap kinerja perusahaan,

Populasi yang dalam penelitian ini adalah semua perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) selama periode penelitian, yaitu tahun 2010-2012. Sampel dalam penelitian ini 198 sampel perusahaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komposisi komisaris independen (mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan , pengaruh ukuran dewan komisaris secara positif terhadap kinerja perusahaan, pengaruh ukuran dewan direksi secara positif signifikan terhadap kinerja perusahaan kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan.

*Kata Kunci : ukuran dewan komisaris, ukuran komisaris independen, ukuran dewan direksi, kepemilikan manajerial, kinerja perusahaan,*

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Alhamdulillah rabbil'alamin. Segala Puji dan syukur kepada Allah S.W.T karena atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi dengan judul **Pengaruh Hubungan Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan** (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan dan Keuangan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2012) dapat selesai sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan pendidikan sarjana (S-1) ini di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang. Penulis menyadari bahwa dari awal, proses, dan hingga terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari segala bentuk bantuan, bimbingan, dorongan dan do'a dari berbagai pihak, maka untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Suharnomo, SE., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Dr. Haryanto, S.E, M.Si., Akt. selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, nasehat, dan dukungannya selama penulis menyelesaikan skripsinya hingga terselesaiannya skripsi ini.
3. Prof. Dr. Much. Syafrudin, M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
4. Dr. Etna Nur Afri Yuyetta, S.E, M.Si., Akt., selaku dosen wali yang telah memberikan pengarahan dalam melaksanakan studi.
5. Bapak Ibu dosen dan seluruh staf pengajar yang pernah memberikan ilmu dan pembelajaran yang bermanfaat kepada penulis.

6. Drs. Azwan Saprani MM dan Herlina S.H sebagai orang tua tercinta yang sangat penulis sayangi dan penulis banggakan. Terima kasih atas segala doa dan dukungannya baik materiil maupun moril dan kasih sayang yang tidak terbatas kepada penulis, semoga penulis bisa membahagiakan mereka suatu saat nanti.
7. Miranda Calista. Sebagai adikku tersayang, terima kasih atas segala doa dan juga dukungan motivasinya.
8. Saudara-saudaraku N2O: Ardi “pak weng”, Arko, Bryan “kobeh”, Chandra “chon2”, Doi , Emiral, Fakhri, Irfan “ipang”, Maharsi, Pebi, Pradana “yuda”, Raditya “ompong”, Rinaldi “gendut” , Satria “nucky”, Satrio “paklek”, Tirta “bung pambudi”, andris “ruli”, yang telah memberikan banyak pelajaran berharga dalam kehidupan. Terima kasih untuk persahabatan, kekeluargaan, kebersamaan, dan kekompakan selama di bangku kuliah. Jangan pernah putus silaturahmi kita. Kalian istimewa.
9. Teman-teman akuntansi angkatan 2008 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, terima kasih atas segala dukungan dan do'anya, semoga pertemanan ini tetap terjalin sampai kapanpun.
10. Teman-teman Lacittadelle Rendy, Tito, Khrisna, Andri, Dondon, Fahd, Pak Hadi, Reza, Kris, Deffa, Adit. Terima kasih telah memberikan nuansa keluarga di kota perantauan ini. Terima kasih
11. Linda Wahyu Yunisari sebagai kekasihku. Terima kasih telah mendampingi aku selama ini. Semoga kita selalu diberikan yang terbaik oleh Allah SWT

12. Teman-teman Freelance Family: Prio, Tommy, Dinan, Fakhri, Daniel, Yusuf, Resha, Raka, Rirri, Ferina, Ladina, Mas Nanda, Bidari, Jarot, Opi dan member-member lain.
13. Geng kekar Mountainleaf: Agung, Teguh, Mas Nug, Mas Wawan, Kikio, Anindyo, Ais, Yoga. Tetap sehat tetap semangat kawan.
14. Pacul Gengs: Saverio, Julkipli, Rio Diaz, Donbosco, Ivan Nuari, Febriansyah dan Karyadi

Penulis sadar bahwa kesempurnaan hanya milih Tuhan Yang Maha Esa, apabila terdapat kesalahan, kekurangan, dan hal yang kurang berkenan penulis mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb**

Semarang, 1 April 2015

**Yudha Prawira**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iii
<i>ABSTRACT</i> .....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian.....	10
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	10
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	10
1.4 Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>13</b>
2.1 Tinjauan Pustaka .....	13
2.1.1 <i>Agency Theory</i> .....	13
2.1.2 <i>Good Corporate Governance</i> .....	16
2.1.3 <i>Mekanisme Corporate Governance</i> .....	21
2.1.4 Indikator Mekanisme Corporate Governance.....	27

2.1.5	Kinerja Perusahaan .....	32
2.2	Penelitian Terdahulu.....	33
2.3	Kerangka Pemikiran Teoritis.....	38
2.4	Pengembangan Hipotesis.....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>44</b>
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....	44
3.1.1	Variabel Penelitian .....	44
3.1.2	Definisi Operasional.....	45
3.2	Populasi dan Sampel .....	45
3.3	Jenis dan Sumber Data .....	46
3.4	Metode Pengumpulan Data .....	47
3.5	Teknik Analisa Data.....	47
3.5.1	Uji Asumsi klasik .....	47
3.5.2	Analisis Regresi Berganda .....	50
3.5.3	Pengujian Hipotesis.....	51
<b>BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>52</b>
4.1	Analisa Diskriptif .....	52
4.2	Diskripsi Statistik.....	53
4.3	Teknik Analisa Data.....	56
4.3.1	Uji Asumsi klasik .....	56
4.3.2	Analisis Regresi Berganda.....	62
4.4	Pengujian Hipotesis.....	63
4.5	Pembahasan .....	67

<b>BAB V KESIMPULAN DAN PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
5.1 Kesimpulan .....	71
5.2 Saran.....	72
5.3 Keterbatasan Penelitian .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b>	Review Penelitian Terdahulu .....	36
<b>Tabel 4.1</b>	Metode Pengambilan Sample Penelitian.....	52
<b>Tabel 4.2</b>	Deksriptif Statistik .....	53
<b>Tabel 4.3</b>	Pengujian Normalitas Dengan Uji Statistik Kloromov Smirnov .....	57
<b>Tabel 4.4</b>	Uji Statistik Normalitas Residual Klomogorov Smirnov Setelah Tranformasi dan Outlier .....	58
<b>Tabel 4.5</b>	Hasil Uji Glejser.....	61
<b>Tabel 4.6</b>	Hasil Uji Multikolinieritas .....	60
<b>Tabel 4.7</b>	Hasil Uji Regresi .....	62
<b>Tabel 4.8</b>	Hasil Uji Simultan (Uji F).....	64
<b>Tabel 4.9</b>	Hasil Analisis Koefisien Regresi dan (Uji t).....	65
<b>Tabel 4.10</b>	Hasil Uji Determinasi.....	67

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b>	Kerangka Pemikiran .....	39
<b>Gambar 3.1</b>	Statistik hitung Durbin-Watson.....	49
<b>Gambar 4.1</b>	Uji Heteroskedastisitas Deangan Scatter Plot	60

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.5 Latar Belakang Masalah**

Perusahaan memiliki berbagai alternatif sumber pendanaan. Pendanaan dari dalam perusahaan diperoleh dari laba yang ditahan perusahaan. Pendanaan dari luar perusahaan berasal dari kreditur berupa utang maupun pendanaan yang bersifat penyertaan dalam bentuk saham (equity). Pendanaan melalui mekanisme penyertaan, dilakukan dengan menjual saham perusahaan kepada masyarakat atau sering dikenal dengan go public (Hikmawan, 2007 dalam Fanny, 2010).

Tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham. Untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut, pemilik modal pada umumnya menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada para profesional yang disebut sebagai manajerial atau insider. Manajer yang diangkat oleh pemilik modal dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan sehingga kemakmuran pemilik modal dapat tercapai. Namun, pihak manajemen atau manajer perusahaan sering mempunyai tujuan lain yang bertentangan dengan tujuan utama tersebut sehingga akan timbul konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Pemegang saham sebagai penyedia dan fasilitator untuk operasi perusahaan, sedangkan manajer sebagai pengelola perusahaan akan menerima gaji dan berbagai bentuk kompetensi lainnya sehingga keputusan

yang diambil oleh manajer diharapkan yang terbaik bagi pemegang saham yaitu meningkatkan kemakmuran *stakeholder* (para pemegang saham). Dalam kenyataannya, tidak jarang tindakan manajer bukannya memaksimalkan kemakmuran pemegang saham, melainkan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri (Jensen dan Meckling, 1976).

Hubungan manajer dengan pemegang saham di dalam *agency theory* digambarkan sebagai hubungan antara *agent* dan *principal*. Manajer sebagai *agent* dan pemegang saham sebagai *principal*. Manajer harus mengambil keputusan bisnis terbaik untuk meningkatkan kekayaan pemegang saham. Keputusan bisnis yang diambil manajer adalah memaksimalkan sumber daya (utilitas) perusahaan. Namun demikian pemegang saham tidak dapat mengawasi semua keputusan dan aktivitas yang dilakukan oleh manajer. Suatu ancaman bagi pemegang saham jika manajer akan bertindak untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk kepentingan pemegang saham. Inilah yang menjadi masalah dasar dalam *agency theory* yaitu adanya konflik kepentingan.

Pemegang saham dan manajer masing-masing berkepentingan memaksimalkan tujuannya. Konflik kepentingan terjadi jika keputusan manajer hanya akan memaksimalkan kepentingannya dan tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham. Perilaku manajer dalam situasi konflik kepentingan inilah yang menarik untuk diteliti. Keputusan dan aktivitas manajer yang memiliki saham perusahaan tentu akan berbeda dengan manajer yang murni sebagai manajer. Manajer yang memiliki saham perusahaan

berarti manajer tersebut sekaligus adalah pemegang saham. Manajer yang memiliki saham perusahaan tentunya akan menselaraskan kepentingannya dengan kepentingannya sebagai pemegang saham. Sementara manajer yang tidak memiliki saham perusahaan, ada kemungkinan hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Kepemilikan saham perusahaan oleh manajer disebut dengan kepemilikan manajerial.

Perusahaan publik akan memiliki dana yang lebih besar yang didapat dari penjualan sahamnya ke masyarakat dan diharapkan kinerja perusahaan mengalami peningkatan. Perusahaan *go public* membutuhkan pengelolaan *corporate governance* yang baik atau yang lebih dikenal dengan *good corporate governance*. *Good corporate governance* adalah sebuah konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi yang akurat, benar dan tepat waktu. Selain itu juga menunjukkan kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan (*disclosure*) semua informasi keuangan kinerja perusahaan secara akurat, tepat waktu dan transparan (Tjager, 2003 dalam Darmawati, 2004). Oleh karena itu, perusahaan publik harus memandang *good corporate governance* bukan sebagai aksesoris belaka, tetapi sebagai upaya peningkatan kinerja dan nilai perusahaan.

*Corporate Governance (CG)* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai pihak dalam perusahaan yang menentukan antara arah dan kinerja perusahaan (Monks & Minow, 2001). Isu mengenai *Corporate Governance (CG)* mulai menjadi

pembahasan yang penting, khususnya di Indonesia, yaitu setelah Indonesia mengalami masa krisis yang berkepanjangan sejak tahun 1998. Banyak pihak yang mengatakan bahwa lamanya proses perbaikan masalah krisis yang terjadi di Indonesia disebabkan karena sangat lemahnya *Corporate Governance* yang diterapkan dalam perusahaan di Indonesia. Sejak saat itu, baik pemerintah maupun investor mulai memberikan perhatian yang cukup signifikan dalam praktek *Corporate Governance*.

Penerapan *Corporate Governance* merupakan salah satu upaya yang cukup signifikan untuk melepaskan diri dari krisis ekonomi yang telah melanda Indonesia. Peran dan tuntutan para investor dan kreditor asing mengenai penerapan prinsip *Corporate Governance* merupakan salah satu faktor dalam pengambilan keputusan berinvestasi dalam suatu perusahaan. Untuk itu penerapan *Corporate Governance* di Indonesia sangat penting, karena prinsip *Corporate Governance* dapat memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan, sehingga perusahaan di Indonesia tidak tertindas dan dapat bersaing secara global.

Dengan adanya sistem *Corporate Governance* para pemegang saham dan investor menjadi yakin akan memperoleh return atas investasinya, karena *Corporate Governance* dapat memberikan perlindungan efektif bagi para pemegang saham dan investor. *Corporate Governance* juga dapat membantu dalam menciptakan lingkungan yang kondusif demi terciptanya pertumbuhan yang efisien di sektor korporat. Dalam hal ini *Corporate Governance* dapat didefinisikan sebagai

susunan aturan yang menentukan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan dan stakeholder internal dan eksternal yang lain sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya. (FCGI, 2003).

Terdapat lima pilar dalam prinsip-prinsip corporate governance yang dikemukakan oleh OECD adalah *fairness* (keadilan), *transparency* (transparansi), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (pertanggung jawaban), dan *independency* (independensi). Pilar-pilar inilah yang melandasi prinsip-prinsip *corporate governance* menurut OECD yaitu hak-hak pemegang saham, perlakuan yang adil kepada pemegang saham, peranan *stakeholder* dalam *corporate governance*, pengungkapan dan transparansi, serta tanggung jawab dewan direksi.

Prinsip-prinsip di atas ditujukan untuk mewujudkan *good corporate governance* (GCG) yang merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi semua *stakeholders*. Menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu serta kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu dan transparan mengenai semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholders* (YPPMI & SC, 2002)

Di Indonesia sejak krisis 1997 yang banyak menjadikan banyaknya perbankan yang mengalami kebangkrutan dan juga pada krisis di Amerika pada tahun 2008 yang menyebabkan di ambil alihnya Bank Century oleh

Lembaga Penjamin Simpanan menjadikan perhatian pada penerapan prinsip-prinsip GCG pada bank di Indonesia harus selalu dalam pengawasan. Beberapa kasus tersebut mengindikasikan bahwa perbankan Indonesia cukup rentan terhadap pencurian dana nasabah oleh pihak perbankan itu sendiri.

Selain Bank Century, berdasarkan data dari laporan keuangan diperoleh bahwa tidak semua bank di Indonesia khususnya bank yang go public mampu memperoleh laba yang baik karena beberapa bank mengalami kerugian pada tahun 2008 hingga 2012. Hal ini mengindikasikan bahwa tata kelola beberapa bank masih belum mampu memberikan keuntungan bagi pemilik perusahaan.

Secara konseptual, penerapan mekanisme GCG yang benar dapat mengendalikan kebijakan-kebijakan manajer dan kepentingan public untuk dapat dimanipulasi oleh kepentingan pemimpin perusahaan. Oleh karena itu penelitian mengenai penerapan GCG khususnya pada perusahaan perbankan di Indonesia masih menjadi permasalahan yang layak diteliti.

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pengaruh GCG terhadap kinerja sudah cukup banyak dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Fama dan Jensen, 1983; menyatakan bahwa semakin besar jumlah direktur non eksekutif (NED) pada dewan, maka semakin baik mereka bisa memenuhi peran mereka dalam mengawasi dan mengontrol tindakan direktur eksekutif. Mangel dan Singh, 1993 berpendapat bahwa direktur non eksekutif atau *non executive director* (NED) memiliki kesempatan untuk mengontrol dan menghadapi jaring insentif yang kompleks, yang berasal secara langsung dari

tanggung jawab mereka sebagai direktur dan diperbesar oleh posisi *equity* mereka.

Bukti empiris mengenai hubungan antara direktur non eksekutif (NED) dengan kinerja saham masih belum pasti. Penelitian yang dilakukan Daily dan Dalton, 1994 menemukan bahwa memiliki lebih banyak direktur independent luar pada dewan meningkatkan kinerja, sedangkan menurut Hermalin dan Weisbach, 1991 menemukan bahwa direktur non eksekutif (NED) yang independen tidak berhubungan dengan kinerja perusahaan. Poin yang dapat dibuat dalam penelitian ini adalah bahwa tidak adanya manfaat yang jelas bagi kinerja perusahaan yang diberikan oleh direktur non eksekutif (NED) independent.

Aspek penting ini dari *corporate governance* adalah mengenai kepemilikan manajemen yang tinggi dimana pada manager mendapatkan control yang efektif terhadap perusahaan akan terkait secara negative dengan nilai perusahaan karena pengkubuan manajemen menurut Shleifer dan Vishny, 1989 (dalam Reddy, dkk, 2010). Para peneliti ini menyatakan bahwa para manager mengkubukan dirinya sendiri dengan membuat investasi spesifik yang menjadikan sangat mahal bagi pemegang saham untuk menggantikan mereka. Menurut Wright, 1996, alasan yang mungkin adalah karena manager dengan tingkat kepemilikan saham yang tinggi, potensi untuk portofolio kemakmuran personal yang tidak didiversifikasikan, dan potensi untuk pengkubuan mungkin menyebabkan keputusan – keputusan manajemen

yang tidak konsisten dengan tujuan peningkatan nilai pemegang saham yang berorientasi pertumbuhan dan pengambilan resiko.

Bukti empiris mengenai kepemilikan manajerial dengan kinerja perusahaan juga belum jelas. Penelitian yang dilakukan Himmelberg et al., 1999 tidak menemukan korelasi yang bermakna antara kepemilikan manajerial dengan kinerja. Namun, Siallagan dan Machfoedz (2006) menemukan bukti yang kuat bahwa kepemilikan manajerial mempengaruhi nilai perusahaan. Pada industri perbankan, penelitian Andres dan Vallelado (2008) mendapatkan bahwa karakteristik dewan komisaris memiliki pengaruh yang signifikan terhadap diperolehnya ROE yang lebih tinggi pada bank.

Penelitian ini mereplikasi penelitian Andres dan Vallelado (2008) yang juga akan menggunakan perusahaan perbankan di Indonesia. Namun penelitian ini mencoba memperjelas mekanisme GCG yang digunakan sebagai predikto kinerja. Penelitian ini hanya memasukkan 5 (lima) karakteristik *good corporate governance* yaitu komposisi komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, hutang serta kualitas audit. Peneliti mencoba mengklarifikannya dalam tiga aspek yaitu (1) mekanisme internal (komisaris independent dan kualitas audit), (2) kepemilikan (kepemilikan institusional, kepemilikan asing) dan (3) keuangan (hutang).

Namun demikian fenomena kondisi yang kurang baik pada bank belum pasti terkait langsung dengan kondisi implementasi GCG dalam bank tersebut. Untuk itu penelitian mengenai pengaruh GCG terhadap kinerja bank

akan dilakukan dalam penelitian ini. Terkait dengan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian tentang “ Pengaruh Hubungan *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan”

## 1.6 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan rumusan masalah penelitian yaitu adanya beberapa *research gap* dalam penelitian-penelitian sebelumnya yang menghubungkan *corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan belum terbukti secara bulat. Penelitian yang dilakukan Himmelberg et al., 1999 tidak menemukan korelasi yang bermakna antara kepemilikan manajerial dengan kinerja. Namun, Khanna dkk., 2005 menemukan bukti yang kuat bahwa kepemilikan manajerial mempengaruhi nilai perusahaan. Pada industri perbankan, penelitian Andres dan Valledado (2008) mendapatkan bahwa karakteristik dewan komisaris memiliki pengaruh yang signifikan terhadap diperolehnya ROA yang lebih tinggi pada bank. Berdasarkan uraian tersebut, dapat di rumuskan masalah peneliti sebagai berikut :

1. Apakah ukuran dewan komisaris mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan ?
2. Apakah indenpendensi komisaris independen mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan perbankan ?
3. Apakah ukuran dewan direksi mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan ?

4. Apakah kepemilikan institusional mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan ?

## **1.7 Tujuan dan Manfaat penelitian**

### **1.7.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh dan independensi dewan komisaris terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan.
2. Untuk menganalisis pengaruh independensi komisaris independen terhadap kinerja keuangan perusahaan keuangan.
3. Untuk menganalisis pengaruh ukuran dewan direksi terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan keuangan.
4. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan keuangan.

### **1.7.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk semua pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini, baik manfaat secara praktis maupun secara teoritis, yaitu :

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada beberapa pihak, yaitu :

1. Bagi Peneliti, hasil penelitian dapat sebagai bahan masukan untuk penelitian selanjutnya dan menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang akuntansi keuangan, khususnya tentang mekanisme *good corporate governance* dan kinerja keuangan perusahaan di Indonesia.
2. Bagi Investor, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan untuk berinvestasi.

## **1.8 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan. Adapun sistematika penulisan tersebut sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II TELAAH PUSTAKA**

Bab ini mengkaji landasan teori dan penelitian terdahulu, menggambarkan kerangka pemikiran dan memaparkan hipotesis.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan dibahas variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

### **BAB VI HASIL DAN ANALISIS**

Bab ini berisi deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil statistik.

## BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang dilakukan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1. Agency Theory**

Dasar untuk membahas *corporate governance* adalah teori agensi. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara agent (manajer) dengan principal (investor). Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan principal, sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*). Karena teori keagenan merupakan konsep dasar dari *corporate governance*, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan.

*Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana mereka (investor) yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri, menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana atau kapital yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer (Shleifer dan Vishny dalam Sam'ani, 2008). Dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan *corporate governance* dapat menekan atau menurunkan

biaya keagenan (*agency cost*). Teori agensi dilandasi oleh tiga asumsi sifat manusia menurut Eisenhardt (1989) yaitu :

1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*).
2. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*).
3. Manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*).

Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia akan bertindak *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya (Haris, 2004). Asumsi keorganisasian menurut Arifin (2005) adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya *asymetric information* (AI) antara prinsipal dan agen. Sedangkan asumsi tentang informasi adalah bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang bisa diperjual belikan.

Kebutuhan informasi antara manajer dan investor adalah berbeda. *Asymmetric Information* (AI), yaitu informasi yang tidak seimbang yang disebabkan karena adanya distribusi informasi yang tidak sama antara prinsipal dan agen. Dalam hal ini prinsipal seharusnya memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam mengukur tingkat hasil yang diperoleh dari usaha agen, namun ternyata informasi tentang ukuran keberhasilan yang diperoleh oleh prinsipal tidak seluruhnya disajikan agen (dikutip dalam Arifin, 2005). Hal ini yang menyebabkan kurangnya transparansi kinerja agen dan dapat menimbulkan manipulasi yang dilakukan oleh agen. Informasi yang tidak seimbang (asimetri), dapat menimbulkan kesulitan

prinsipal untuk memonitor dan melakukan kontrol tindakan terhadap agen.

Jensendan Meckling (1976) menyatakan permasalahan tersebut adalah :

1. Moral Hazard, yaitu permasalahan yang muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja.
2. Adverse selection, yaitu suatu keadaan dimana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benarbenar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas.

Karena timbulnya agency problem sehingga biaya keagenan ( agency cost) juga timbul, yang menurut Jensen dan Meckling (1976) terdiri dari :

1. *The monitoring expenditures by the principle.* Biaya monitoring dikeluarkan oleh prinsipal untuk memonitor perilaku agen, termasuk juga usaha untuk mengendalikan (*control*) perilaku agen.
2. *The bonding expenditures by the agent.* Biaya yang dikeluarkan oleh agen untuk menjamin bahwa agen tidak akan menggunakan tindakan tertentu yang akan merugikan prinsipal setelah adanya agency relationship .
3. *The residual loss.* Merupakan penurunan kesejahteraan prinsipal dan agen yang disebabkan oleh tindakan agen sendiri.

Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Manajer berkewajiban

memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut penting bagi para pengguna terutama eksternal, karena kelompok ini berada dalam kondisi yang paling besar ketidakpastiannya (Ali,2002).

Ketidakseimbangan penguasaan informasi akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (*information asymetry*). Asimetri antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (*earning managements*) dalam rangka menyesatkan pemilik (pemegang saham) mengenai kinerja ekonomi perusahaan (Sam'ani,2008)

### **2.1.2 Good Corporate Governance**

Sebagai sebuah konsep, *Good Corporate Governance* (GCG) tidak memiliki definisi tunggal. Beberapa organisasi mengemukakan antara lain: KomiteCadburry (1992) (dalam Che Haat, 1005)(melalui apa yang dikenal dengan sebutan *Cadburry Report* mengeluarkan definisi tersendiri tentang CCC :

“GCG adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholders* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya.”

*Center for European Policy Studies* (1999) mendefinisikan GCG sebagai berikut :

“GCG merupakan *seluruh* sistem yang dibentuk mulai dari hak (*right*), proses, pengendalian, baik yang ada di dalam maupun di luar manajemen perusahaan.”

*Organization for Economic Cooperation and Development* (2004) mendefinisikan:

“GCG adalah cara-cara manajemen perusahaan bertanggungjawab pada *shareholder-nya*. Parapengambil keputusan di perusahaan haruslah dapat dipertanggungjawabkan, dan keputusan tersebut mampu memberikan nilai tambah bagi *shareholders* lainnya.”

*Finance Committee on Corporate Governance Malaysia* (2008), menurut lembaga tersebut dideftnisikan sebagai berikut :

“GCG merupakan suatu proses serta struktur yang digunakan untuk mengarahkan sekaligus mengelola bisnis dan urusan perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan: Adapun tujuan akhirnya adalah menaikkan nilai saham dalam jangka panjang tetapi tetap memperhatikan berbagai kepentingan para *stakeholders* lainnya.”

Namun tampaknya secara umum di kalangan pebisnis, istilah GCG diartikan tata kelola perusahaan. Kemudian, GCG didefinisikan sebagai suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (*Board of Director* (BOD), Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada Pemegang Saham secara berkesinambungan dalam jangka Panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya; berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku (Darmawati, 2002).

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan:

1. Suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham dan Para *Stakeholders* lainnya.
2. Suatu sistem pengecekan dan perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang: pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan.
3. Suatu proses yang transparan atas Penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, berikut pengukuran kinerjanya.

Dari pengertian di atas pula, tampak beberapa aspek penting dari GCG yang perlu dipahami beragam kalangan di dunia bisnis; yakni:

- a. Adanya keseimbangan hubungan antara organ-organ perusahaan di antaranya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); Komisaris; dan Direksi. Keseimbangan ini mencakup hal yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme operasional ketiga organ perusahaan tersebut (keseimbangan internal).
- b. Adanya pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada seluruh *stakeholder*. Tanggung jawab ini meliputi hal yang terkait dengan pengaturan hubungan antara perusahaan dengan *stakeholders* (keseimbangan eksternal). Diantaranya, tanggung jawab pengelola/pengurus perusahaan; manajemen; pengawasan; serta

pertanggungjawaban kepada para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya.

- c. Adanya hak Pemegang Saham untuk mendapat informasi yang tepat dan benar pada waktu yang diperlukan mengenai perusahaan: Kemudian hak berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perkembangan strategis dan perubahan mendasar atas perusahaan serta ikut menikmati keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam pertumbuhannya.

Prinsip-prinsip *good corporate governance* yang dikembangkan OECD (1999) dikutip oleh Darmawati (2002) meliputi 5 hal sebagai berikut :

1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham

Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus mampu melindungi hak-hak para pemegang saham yaitu hak untuk (1) menjamin keamanan metode pendaftaran kepemilikan (2) mengalihkan atau memindahkan saham yang dimilikinya (3) memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan teratur (4) ikut berperan dan memberikan suara dalam RUPS (5) memilih anggota dewan komisaris (6) memperoleh pembagian keuntungan perusahaan

2. Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham

Kerangka *corporate governance* harus menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Seluruh pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan penggantian atau perbaikan atas pelanggaran dari hak-hak mereka. Prinsip ini juga mensyaratkan adanya perlakuan yang

sama atas saham-saham yang berada dalam kelas, melarang praktik-praktik *-insider trading* dan *self dealing*, dan mengharuskan anggota dewan komisaris untuk melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*)

### 3. Peranan *stakeholders* yang terkait dengan perusahaan

Kerangka *corporate governance* harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak stakeholder seperti ditentukan dalam UU dan mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dengan para stakeholder tersebut dalam rangka menciptakan kesejahteraan; lapangan pekerjaan dan kesinambungan usaha:

### 4. Keterbukaan dan Transparansi

Kerangka *corporate governance* harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan. Pengungkapan ini meliputi informasi mengenai keadaan keuangan, kinerja Perusahaan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Disamping itu, informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi. Manajemen juga diharuskan meminta auditor eksternal melakukan audit yang bersifat independen atas laporan keuangan.

### 5. Akuntabilitas Dewan Komisaris (*board of directors*)

Kerangka *corporate governance* harus menjamin adanya pedoman strategis perusahaan; pementauan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Akuntabilitas Dewan Komisaris terhadap perusahaan dan pemegang

saham Prinsip ini juga memuat kewenangan-kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris beserta kewajiban-kewajiban profesionalnya kepada pemegang saham dan *stakeholders* lainnya:

### **2.1.3. Mekanisme *Corporate Governance***

Mekanisme *Corporate Governance* merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol terhadap keputusan tersebut. Mekanisme *Corporate Governance* diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem *governance* dalam sebuah organisasi (Ujiyanto, 2005).

Walsh dan Seward (1990) menyatakan bahwa terdapat 2 mekanisme untuk membantu menyamakan perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer dalam rangka penerapan *Corporate Governance*, yaitu :

1. Mekanisme pengendalian internal perusahaan yaitu pengendalian yang dilakukan dengan membuat seperangkat aturan yang mengatur tentang mekanisme bagi hasil, baik yang berupa keuntungan, *return* maupun resiko yang disetujui oleh principal dan agen. Salah satu pilihan mekanisme pengendalian internal adalah kontrak insentif jangka panjang. Kontrak jangka panjang ini dilakukan dengan memberikan insentif pada manajer apabila nilai perusahaan atau meningkatkan kemakmuran pemegang saham meningkat. Dengan demikian, *manajer* akan termotivasi untuk meningkatkan nilai perusahaan atau meningkatkan kemakmuran pemegang

saham karena hal tersebut juga akan meningkatkan kekayaan manajer sendiri.

2. Mekanisme pengendalian eksternal berdasarkan pasar adalah pengendalian perusahaan yang dilakukan oleh pasar. Menurut teori pasar untuk pengendalian perusahaan (*market for corporate control*), pada saat diketahui bahwa manajemen berperilaku menguntungkan diri sendiri kinerja perusahaan akan menurun yang direfleksikan oleh nilai saham perusahaan. Pada kondisi tersebut; kelompok manajer lain akan menggantikan manajer yang sedang memegang jabatan. Dengan demikian bekerjanya *market for corporate control* bisa menghambat tindakan menguntungkan diri manajer sendiri (Jensen dan Meckling, 1976).

Penerapan Prinsip-Prinsip *Corporate Governance* Untuk pengembangan perusahaan publik sebagai acuan praktik sistem tata kelola yang baik, Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* mengacu pada prinsip yang diterbitkan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* yang merupakan salah satu lembaga yang memegang peranan penting dalam pengembangan *Good Governance* baik untuk pemerintah maupun dunia usaha. Pertama kali OECD mengeluarkan prinsip-prinsip *corporate governance*. Prinsip dasar *corporate governance* yang dikeluarkan OECD dalam Herwidayatmo (2000) adalah :

1. Perlindungan terhadap hak - hak pemegang saham. Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus mampu melindungi hak-

hak para pemegang saham. Hak-hak tersebut meliputi hak-hak dasar pemegang saham, yaitu hak untuk:

- a. Menjamin keamanan metode pendaftaran kepemilikan.
  - b. Mengalihkan atau memindahkan saham yang dimilikinya.
  - c. Memperoleh informasi yang relevan mengenai perusahaan secara berkala dan teratur.
  - d. Dapat ikut berperan dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
  - e. Memilih anggota dewan komisaris dan direksi, dan selanjutnya.
  - f. Memperoleh pembagian keuntungan perusahaan atau deviden.
2. Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham. Kerangka *corporate governance* harus dapat menjamin adanya perlakuan sama terhadap seluruh pemegang saham, termasuk para pemegang saham minoritas dan asing. Seluruh pemegang saham harus memiliki, kesempatan untuk mendapatkan penggantian atau perbaikan atas pelanggaran dari hak-hak mereka. Prinsip ini juga mensyaratkan adanya perlakuan yang sama atas saham-saham yang berada dalam satu kelas, melarang praktek-praktek *insider trading* dan *self dealing* serta mengharuskan anggota dewan komisaris untuk melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*).

3. Peranan stakeholders yang terkait dengan perusahaan.

Kerangka *corporate governance* harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak *stakeholders*, seperti yang telah ditentukan dalam undang - undang, dan mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaandengan para stakeholders tersebut dalam rangka menciptakan lapangankerja, kesejahteraan masyarakat dan kesinambungan usaha.

4. Keterbukaan dan Transparansi.

Kerangka *corporate governance* harus dapat memberikan jaminan adanya pengungkapan yang tepat waktu akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan. Pengungkapan ini meliputi informasi tentang keadaan keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan. Selain itu informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi. Manajemen juga diharuskan meminta auditor eksternal melakukan audit yang bersifat independen atas laporan keuangan perusahaan.

5. Akuntabilitas Dewan Komisaris (Board of Directors).

Kerangka *corporate governance* harus dapat menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen yang dilakukan oleh dewan komisaris serta akuntabilitas dewan komisaris terhadap perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip ini juga memuat kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris beserta kewajiban profesionalnya kepada para pemegang saham dan

*stakeholders* lainnya. Selanjutnya dalam Lestariningsih (2008) selain prinsip-prinsip *corporate governance* dari OECD, perlu juga dikemukakan prinsip - prinsip *corporate governance* yang lain untuk menambah wawasan tentang penerapan GCG pada perusahaan publik untuk memperkuat daya tahan perusahaan perusahaan tersebut yaitu dari The Australia Stock Exchange (ASX). Prinsip-prinsip *corporate governance* dari *The ASX corporate governance* atau nama lainnya *The Principles of Good corporate governance and Best Practice Recommendation* adalah sebagai berikut:

1. Membangun landasan kerja yang kuat bagi manajemen perusahaan dan *Board of Directors* (*Establish solid foundation for management and over Sight by the Board*) untuk dapat mencapai tujuan bisnis mereka secara berhasil, perusahaan wajib membangun kesadaran para anggota manajemen atas hak dan tanggungjawab mereka. *Board of director* wajib mengahayati dan melaksanakan hak mereka serta mengendalikan dan mengawasi kegiatan bisnis perusahaan.
2. Menyusun struktur organisasi *the Board of Directors* yang dapat menjamin efektivitas kerja dan meningkatkan nilai perusahaan (*Structure the Board to add value*).
3. Mengembangkan kebiasaan mengambil keputusan yang etis dan dapat dipertanggung jawabkan (*Promote ethical and responsibly*

*decision making*). Kebiasaan tersebut harus dimulai dari tingkat atas dalam organisasi perusahaan.

4. Menjaga integritas laporan keuangan (*Safeguard integrity in financial reporting*) *The ASX corporate governance Council* menganjurkan manajemen perusahaan publik menyusun laporan keuangan tengah tahunan dan menyampaikannya kepada *Board of Directors* dan selanjutnya *The Board* akan meneruskannya kepada para pemegang saham.
5. Mengungkapkan semua informasi tentang kondisi dan perkembangan perusahaan kepada para pemegang saham secara tepat waktu dan seimbang (*Make timely and balanced disclosure*).
6. Menghormati hak dan kepentingan para pemegang saham (*Respect the right of shareholders*).
7. Menyadari risiko bisnis dan mengelolanya secara profesional (*Recognize and manage risk*). Perusahaan yang ditata kelola secara sehat tentu menyusun prosedur serta mengevaluasi resiko bisnis dan investasi yang mungkin akan mereka hadapi, oleh sebab itu mereka harus mengelola resiko bisnis secara profesional.
8. Mendorong peningkatan kinerja *Board of Directors* dan manajemen perusahaan (*Encourage enhanced performance*).
9. Menjamin pemberian balas jasa pimpinan dan karyawan perusahaan secara adil dan dapat dipertanggung jawabkan (*Remunerate fairly and responsibly*).

10. Memahami hak dan kepentingan para pemegang saham atau stakeholder yang sah. (ASX, 2003)

#### **2.1.4. Indikator Mekanisme Corporate Governance**

##### **1. Dewan Komisaris**

Perusahaan dunia pada umumnya yang sudah menerapkan *corporate governance*, mengklasifikasikan kerangka kerjanya menjadi dua model yaitu *onetier board (unitary board model)* atau *two-tier board model* (Lukviarman dalam Yonedidan Dewi, 2008). Indonesia sendiri mengadopsi *two-tier system of board*, karena perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum perusahaan Indonesia (2007) harus memiliki dua dewan, yaitu badan pengawas yang melakukan peran monitoring dan badan pengelola yang melakukan peran eksekutif. Dewan pengawas jelas terpisah fungsinya dari dewan independen dan dewan eksekutif (pengelola). Struktur pengawasan *two-tier board* mempunyai pemisah yang jelas antara dewan komisaris dan dewan manajemen. Dewan manajemen bertanggung jawab atas manajemen perusahaan dan dewan komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi dewan direksi. Sistem ini untuk meningkatkan dan memeriksa keuangan yang diperlukan untuk keperluan *corporate governance* (Tumbuandalam Yonedidan Dewi, 2008).

Berkaitan dengan adanya dua jenis struktur pengawasan dan pengelolaan perusahaan, yaitu *two-tier boards* dan *unitary board*, prinsip ini secara umum dapat diterapkan baik pada perusahaan yang

memisahkan fungsi dewan komisaris sebagai pengawas (*non-executive director*) dan dewan direksi sebagai pengurus perusahaan (*executive director*), maupun pada perusahaan yang menyatukan antara pengawas dan pengurus perusahaan dalam satu dewan (OECD, 2004).

Tanggung jawab utama dewan komisaris adalah memonitor kinerja manajerial dan mencapai tingkat timbal balik (*return*) yang memadai bagi pemegang saham. Di lain pihak, dewan juga harus mencegah timbulnya benturan kepentingan dan menyeimbangkan berbagai kepentingan di perusahaan. Selain itu ada yang berpendapat bahwa dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas (Egon Zehnder Internasional, dalam Lestariningsih, 2008).

## 2. Dewan Komisaris Independen

Perusahaan yang sudah melakukan *corporate governance* diwajibkan untuk mempunyai dewan komisaris independen. Dewan komisaris independen anggotanya tidak berasal dari dewan komisaris, dewan direksi ataupun para pemegang saham yang kuat. Karena dewan komisaris independen berfungsi sebagai pemisah kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen. Proporsi minimum dewan komisaris independen adalah 20% dari keanggotaan dewan komisaris. Dewan komisaris independen diangkat melalui Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS). Dewan komisaris independen harus bukan berasal dari para pemegang saham, bukan bagian dari anggota dewan direksi ataupun anggota dari dewan komisaris (Tumbuan, 2005 dikutip dari IGRA, dalam Yonedidan Dewi,2008).

### 3. Dewan Direksi

Adanya pemisahan peran dikarenakan indonesia mengadopsi *two-tier board* maka pemisahan peran antara pemegang saham sebagai prinsipal dengan manajer sebagai agennya, menyebabkan manajer pada akhirnya akan memiliki hak pengendalian yang signifikan dalam hal mereka mengalokasikan dana investor (Jensen & Meckling, 1976;Shleifer & Vishny, 1997). Selain itu Mizruchi (1983) dalam Midiastuti dan Machfudz (2003) juga menjelaskan bahwa dewan merupakan pusat dari pengendalian dalam perusahaan, dan dewan ini merupakan penanggung jawab utama dalam tingkat kesehatan dan keberhasilan perusahaan secara jangka panjang (Louden, 1982 dalam Midiastuti dan Machfudz, 2003).

Beiner et al. (2003) menyatakan bahwa kebanyakan perusahaan memilihjumlah dewan direktur yang optimal, Sedangkan Syakhroza (2002) mengatakan bahwa dalam perundang-undangan di Indonesia, perusahaan Indonesia tidak diberi batasan berapa banyak seharusnya jumlah dewan direksi. Peraturan hanya menyebutkan bahwa untuk sebuah perusahaan perseroan terbuka yang menerbitkan surat pengakuan hutang wajib mempunyai paling sedikit dua orang anggota direktur.

#### 4. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian serta institusi lainnya pada akhir tahun (shien, ,dkk 2006) dalam anindhita (2010). Struktur kepemilikan perusahaan publik di Indonesia sangat terkonsentrasi pada institusi. Institusi yang dimaksudkan adalah pemilik perusahaan publik berbentuk lembaga, bukan pemilik atas nama peseorangan pribadi. Mayoritas institusi adalah berbentuk perseroan terbatas (PT). Pada umumnya PT merupakan bentuk kepemilikan pendiri perusahaan perusahaan atau keluarga pendiri perusahaan. Husnan (2001) menegaskan bahwa ada dua jenis kepemilikan dalam perusahaan di Indonesia yaitu kepemilikan menyebar dan kepemilikan terkonsentrasi. Menurut Goldberg dan Idson (dikutip dari Husnan, 2001) perusahaan kepemilikan menyebar adalah perusahaan yang kepemilikannya lebih menyebar memberikan imbalan yang lebih besar kepada pihak manajemen daripada perusahaan yang kepemilikannya terkonsentrasi. Dalam perusahaan dengan kepemilikan menyebar, masalah keagenan sering timbul antara agen (pihak manajemen) dengan owners (pemegang saham).

Jenis kepemilikan perusahaan yang kedua adalah perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi. Perusahaan seperti ini timbul dua kelompok pemegang saham, yaitu controlling dan minority

shareholders (Asian Development Bank, 2000 dikutip dalam Husnan, 2001). Pemegang saham pengendali atau pemegang saham mayoritas (controlling shareholders) dapat bertindak sama dengan kepentingan pemegang saham atau bertentangan dengan kepentingan pemegang saham, disamping itu juga mempunyai informasi yang lebih lengkap daripada pemegang saham minoritas, dan hal ini akan mempengaruhi perilaku perusahaan (The Bussines Roundtable, 1997). Pada kasus konsentrasi kepemilikan ini, kemungkinan masalah keagenan yang muncul adalah antara pemilik mayoritas dan pemilik minoritas. Pemilik mayoritas ikut dalam pengendalian perusahaan sehingga cenderung bertindak untuk kepentingan mereka sendiri meskipun dengan mengorbankan kepentingan pemilik minoritas (Ndaruningpuri, 2005).

Karakteristik kepemilikan perusahaan yang terkonsentrasi banyak dijumpai untuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa di Indonesia (Husnan, 2001). Gunarsih (2003) meneliti negara-negara di Asia (berdasarkan pada French Civil Law) termasuk negara Indonesia, yang salah satu ciri utamanya adalah struktur kepemilikan perusahaan yang terkonsentrasi. Pada negara dengan ciri struktur kepemilikan perusahaan terkonsentrasi, kepemilikan dalam jumlah besar mempunyai potensi menimbulkan benturan kepentingan dengan pemilik minoritas. Kelemahan dari kepemilikan yang terkonsentrasi menurut prowsen (1998), adalah apabila pemilik semakin berkuasa maka dapat mengendalikan perusahaan. Kelemahan lainnya oleh Shleifer dan

Vishny (1997) adalah kepemilikan dalam jumlah besar dapat mendahulukan kepentingan mereka sendiri yang dapat bertentangan dengan pemilik lainnya (tri Gunarsih, 2003 dalam Ndaruningpuri, 2005)

#### **2.1.5. Kinerja Perusahaan**

Penilaian kinerja perusahaan adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi; bagian organisasi; dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Siallagan, 2006). Salah satu ukuran kinerja perusahaan adalah profitabilitas.

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba (keuntungan) dalam suatu periode tertentu. Pengertian yang sama disampaikan oleh Husnan (2014) bahwa profitabilitas adalah perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (profit) pada tingkat penjualan; asset, dan modal saham tertentu.

Husnan (2001) berpendapat bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Dengan demikian, bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisa profitabilitas ini. Sedangkan Brigham dan Houston (2001) mendefinisikan profitabilitas sebagai hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan.

Rasio profitabilitas merupakan perbandingan antara laba perusahaan dengan investasi atau ekuitas yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut. Rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk

menghasilkan laba dalam hubungannya dengan penjualan total aktiva, maupun modal sendiri. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan semakin tinggi efisiensi perusahaan tersebut dalam memanfaatkan fasilitas perusahaan.

## **2.2. Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai pengaruh mekanisme corporate governance diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Totok Dewayanto (2010) PENGARUH MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERBANKAN NASIONAL Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2008. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa variabel OWN tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan, variabel FOR tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan, variabel GOV tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan, variabel BOD tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan, variabel BOC berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja perbankan, variabel INDB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja perbankan, variabel CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perbankan, variabel Big 4 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perbankan dan variabel SIZE berpengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja perbankan.

2. Rizky Arifani (2012) meneliti tentang PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN (Studi pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia) tahun 2010-2011. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa komite audit mempunyai pengaruh positif terhadap ROE, kepemilikan manajerial negatif tidak signifikan terhadap ROE dan kepemilikan institusional mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan
3. Himmelberg, (1999) meneliti hubungan kepemilikan manajerial dan kinerja perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak memiliki hubungan dengan kepemilikan manajerial
4. Siallagan dan Machfoedz (2006) meneliti hubungan diantara mekanisme *corporate governance* dan kualitas laba, kualitas laba dan nilai perusahaan, mekanisme *corporate governance* dan nilai perusahaan. Hasil yang didapat adalah: (1) Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kualitas laba; dewan komisaris secara negatif berpengaruh terhadap kualitas laba; dan komite audit secara positif berpengaruh terhadap kualitas laba: (2) Kualitas laba secara positif berpengaruh terhadap nilai perusahaan. (3) Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan; sementara dewan komisaris dan komite audit secara positif berpengaruh terhadap nilai perusahaan. (4) Kualitas laba bukan merupakan variabel *intervening* antara mekanisme CG dan nilai perusahaan.
5. Ujiyanto dkk (2007) meneliti hubungan diantara mekanisme *corporate governance* terhadap nilai perusahaan dengan manajemen laba

sebagai variabel intervening. Hasil penelitian yang telah dilakukan mendapatkan hasil sebagai berikut: 1) Kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba; 2) Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba; 3) Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba; 4) Jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba; 5) Pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial; proporsi dewan komisaris independen dan jumlah dewan komisaris secara bersama-sama teruji dengan tingkat pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba; dan 6) Manajemen laba (*discretionary accruals*) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan (*cash flow return on assets*).

6. Windah dan Andono (2013) meneliti tentang pengaruh penerapan *corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan hasil penelitian menunjukkan bahwa *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.
7. Iqbal Bukhori, Raharja (2012) yang meneliti mengenai pengaruh *good corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah dewan direksi, jumlah dewan komisaris dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan

Berdasarkan uraian diatas penelitian diatas, dijelaskan lebih rinci dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Review Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti / tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Totok Dewayanto (2010)	PENGARUH MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERBANKAN NASIONAL Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2008	Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa variabel OWN tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan, variabel FOR tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan, variabel GOV tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan, variabel BOD tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan, variabel BOC berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja perbankan, variabel INDB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja perbankan, variabel CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perbankan, variabel Big 4 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perbankan dan variabel SIZE berpengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja perbankan
2	Rizky Arifani (2012)	PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN (Studi pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia) tahun 2010-2011.	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa komite audit mempunyai pengaruh positif terhadap ROE, kepemilikan manajerial negatif tidak signifikan terhadap ROE dan kepemilikan institusional mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan
3	Himmelberg, (1999)	Hubungan kepemilikan manajerial dan kinerja perusahaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak memiliki hubungan dengan kepemilikan manajerial
4	Siallagan dan Machfoedz (2006)	hubungan diantara mekanisme <i>corporate governance</i> dan kualitas	Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kualitas laba; dewan komisaris

		laba, kualitas laba dan nilai perusahaan, mekanisme <i>corporate governance</i> dan nilai perusahaan	secara negatif berpengaruh terhadap kualitas laba; dan komite audit secara positif berpengaruh terhadap kualitas laba: (2) Kualitas laba secara positif berpengaruh terhadap nilai perusahaan. (3) Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan; sementara dewan komisaris dan komite audit secara positif berpengaruh terhadap nilai perusahaan. (4) Kualitas laba bukan merupakan variabel <i>intervening</i> antara mekanisme CG dan nilai perusahaan.
5	Ujiyanto dkk (2007)	Hubungan diantara mekanisme <i>corporate governance</i> terhadap nilai perusahaan dengan manajemen laba sebagai variabel <i>intervening</i>	Kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba; 2) Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba; 3) Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba; 4) Jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba; 5) Pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial; proporsi dewan komisaris independen dan jumlah dewan komisaris secara bersama-sama teruji dengan tingkat pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba; dan 6) Manajemen laba ( <i>discretionary accruals</i> ) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan ( <i>cash flow return on assets</i> ).
6.	Windah dan Andono (2013)	Pengaruh penerapan <i>corporate governance</i> terhadap kinerja	<i>Corporate governance</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

		keuangan perusahaan	
7.	Iqbal Bukhori, Raharja (2012)	Pengaruh <i>good corporate governance</i> dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan	Jumlah dewan direksi, jumlah dewan komisaris dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan

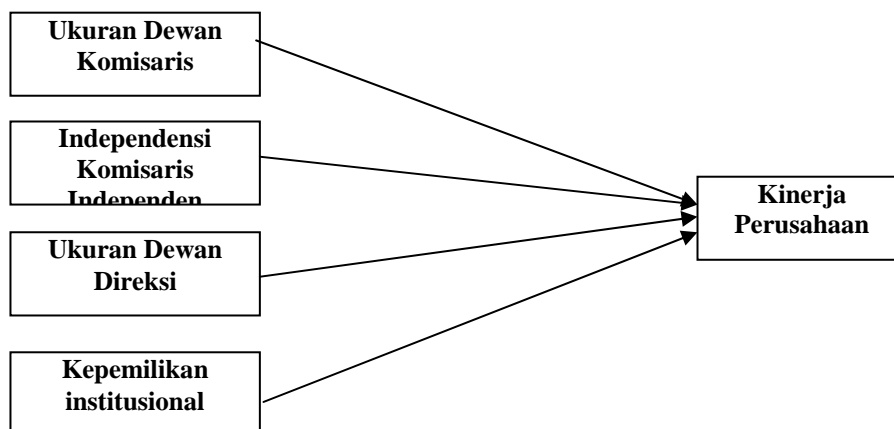
Sumber : Berbagai Jurnal Penelitian

### 2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis

Mekanisme *corporate governance* diharapkan dapat menjadi hal yang dapat mengurangi masalah konflik kepentingan antara agen dan principal, sehingga asimetri informasi yang ada antara manajemen dan pemegang saham akan menjadi kecil. Berdasarkan telaah teoritis serta penelitian terdahulu di atas menunjukkan adanya pengaruh ukuran dewan komisaris, independensi komisaris independen, ukuran dewan direksi, dan kepemilikan institusi terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, dapat dibuat model penelitian sebagai berikut :

**Gambar 1.1**

**Model Hubungan Antara Mekanisme *Good Corporate Governance* dengan Kinerja Perusahaan**



## **2.4.Pengembangan Hipotesis**

### **1. Hubungan Ukuran Dewan Komisaris dan Kinerja Perusahaan**

Menurut Chtourou et al(2001) dalam penelitiannya bahwa dengan jumlah dewan yang semakin besar maka mekanisme monitoring manajemen perusahaan akan semakin baik. Jumlah dewan yang besar menguntungkan perusahaan dari sudut pandang resources dependence) (Totok Dewayanto, 2010) .

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar pemegang saham perusahaan, yang bebas dari hubungan bisnis ataupun hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (KNKG, 2006). Proporsi komisaris independen diukur dengan persentase jumlah komisaris independen dibagidengan total jumlah anggota dewan komisaris (Rizky Arifani, 2012)

Keberadaan Dewan komisaris bertujuan menjamin investor dalam perusahaan menerima return yang cukup atas investasi mereka (Shelier dan Vushny dalam Che Haa, dkk, 2008).Jika peran dewan komisaris ini tidak berfungsi dengan benar maka investor tidak akan merasakan bahwa mereka telah mendanai perusahaan atau membeli ekuitas sekuritas perusahaan. Secara keseluruhan, kinerja ekonomis akanmenderita karena banyak kesempatan bisnisanhilang dan masalah keuangan secara temporer akan menyebar dengan cepat kepada perusahaan lain, karyawan dan konsumen. Jikaekspropriasi yang dilakukan oleh para manajer

meningkat pada saat tingkat kembalian investasi yang diharapkan oleh investor jatuh, maka *shock* yang diakibatkan dari menurunnya tingkat kepercayaan investor akan mendorong terjadinya penurunan *capital inflow* dan meningkatnya *capital outflows* dari suatu negara. Akibat selanjutnya adalah menurunnya harga saham dan alat tukar mata uang negara yang bersangkutan (Dartnawati, 2003)

**H1 : Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.**

## **2. Hubungan antara Independensi Komisaris Independen dengan Kinerja Perusahaan**

Semakin tinggi perwakilan dari outsider director (komisaris independen), maka semakin tinggi independensi dan efektivitas corporate board sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan (Barnhart & Rosenstein, 1998 dalam Lastanti, 2004).

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen (Rizky Arifani, 2012)

Berdasarkan teori keagenan, bahwa semakin besar jumlah komisaris independen pada dewan komisaris, maka semakin baik mereka bisa memenuhi peran mereka di dalam mengawasi dan mengontrol tindakan-

tindakan para direktur eksekutif. Premis dari teori keagenan adalah bahwa komisaris independen dibutuhkan pada dewan komisaris untuk mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan direksi, sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka (Jensen dan Meekling, 1976).

Komisaris independen memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengontrol dan menghadapi jaring insentif yang kompleks; yang berasal secara langsung dari tanggung jawab mereka sebagai direktur dan diperbesar oleh posisi equity mereka. Oleh karena itu, komisaris independen dianggap sebagai mekanisme pemeriksa dan penyeimbang di dalam meningkatkan efektivitas dewan komisaris: Dengan semakin berfungsinya komisaris independen dalam mengawasi manajer, maka kepercayaan investor akan semakin besar akan kinerja yang akan diperoleh perusahaan. Fama dan Jensen (1983) dalam Ujiyanto (2006) menyatakan bahwa *non-executive director* (komisaris independen) dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance*. Berdasarkan uraian diatas dapat dihipotesiskan sebagai berikut :

**H2 : Independensi Komisaris Independen berpengaruh secara positif terhadap Kinerja Perusahaan.**

### 3. Hubungan Ukuran Dewan Direksi dan Kinerja Perusahaan

Peningkatan ukuran dan diversitas dari dewan direksi akan memberikan manfaat bagi perusahaan karena terciptanya network dengan pihak luar perusahaan dan menjamin ketersediaan sumber daya (Pfefer, 1973) dan Pearce & Zahra, 1992 dalam Faisal, 2005) (Rizky Arifani, 2012). Berdasarkan uraian di atas dapat dihipotesiskan sebagai berikut :

**H3 : Ukuran Dewan Direksi berpengaruh secara positif terhadap Kinerja Perusahaan.**

### 4. Hubungan Antara Kepemilikan Institusional dan Kinerja Perusahaan

*Agency Theory* menjelaskan bahwa terdapat pemisahan antara kepemilikan dalam suatu perusahaan, yang akan berpotensi munculnya biaya agensi disebabkan adanya konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Owners memiliki dua pilihan antara menaikkan insentif untuk memaksimalkan utilitasnya atau mengurangi insentif untuk meningkatkan kinerjanya. Oleh sebab itu, para pemegang saham luar akan berusaha untuk memperbaiki fungsi pengawasannya terhadap perilaku manajemen dalam upaya meminimalisir *agency cost* yang mungkin timbul (Jensen and Meckling; 1976).

Secara teoritis ketika kepemilikan institusional rendah, maka insentif terhadap kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik manajerial akan meningkat. Maka penulis dapat diibaratkan hipotesis berikut:

**H4: Kepemilikan Institutional berpengaruh negatif terhadap Kinerja  
Perusahaan**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

##### **3.1.1. Variabel Penelitian**

Penelitian ini menggunakan 1 buah variabel terikat (dependent) dan 4 buah variabel bebas (independen), yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Variabel dependen adalah Kinerja Perusahaan yaitu ukuran mengenai penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya
2. Variabel bebas terdiri dari :
  - a. Independensi komisaris independen merupakan proporsi presentase (%) komisaris independen terhadap total komisaris suatu perusahaan
  - b. Ukuran dewan komisaris independen merupakan para anggota dewan komisaris.
  - c. Ukuran dewan direksi independen merupakan para anggota dewan komisaris:
  - d. Kepemilikan Institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian

### 3.1.2. Definisi Operasional

1. Kinerja perusahaan diukur dengan Return of Equity (ROE). Rizky Afriani, 2012 yang dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total Modal Pemegang saham}} \times 100\%$$

2. Independensi Komisaris Independen

Independensi komisaris independen adalah proporsi dari komisaris independen terhadap total komisaris dalam suatu perusahaan

3. Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris adalah jumlah keanggotaan dari komisaris yang ada pada akhir periode akuntansi. Ujianto, 2007

4. Ukuran Dewan Direksi

Ukuran dewan direksi adalah jumlah keanggotaan dari direksi yang ada pada akhir periode akuntansi, Ujianto, 2007

5. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya pada akhir tahun (shien, et, al 2006)

### 3.2. Populasi dan Sampel

Populasi yang dalam penelitian ini adalah semua perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode penelitian, yaitu tahun 2010-2012. Pemilihan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta sebagai populasi dalam penelitian ini karena

jenis perusahaan perbankan jumlahnya cukup banyak, datanya cukup tersedia, tingkat akrual antar industri berbeda tergantung karakteristik industry, dan model *discretionary accruals* yang berlaku untuk perusahaan manufaktur ternyata tidak berlaku untuk perusahaan non manufaktur. Sedangkan sampel dalam penelitian merupakan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang memenuhi kriteria tertentu. Sampel ini diperoleh dengan metode *purposive sampling*. Adapun kriteria-kriteria tersebut adalah:

1. Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2010-2012
2. Perusahaan perbankan yang memiliki data kepemilikan institusional,
3. Perusahaan perbankan yang melaporkan keuangan tahunan perusahaannya di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2010-2012.

### **3.3. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penulisan ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data-data yang diambil dari catatan atau sumber lain yang telah ada sebelumnya. Data sekunder juga dapat diartikan sebagai data yang sebelumnya telah ditulis atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya. Data diperoleh dari laporan tahunan perusahaan yang dipublikasikan di BEI, *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD) dan [www.jsx.co.id](http://www.jsx.co.id) serta *annual report*

### **3.4. Metode Pengumpulan Data**

Data menurut sumbernya dapat diklasifikasikan dalam data internal, data eksternal, data primer dan data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari Indonesian *Capital Market Directory* dan Pusat Referensi Pasar Modal (PRPM) BEI.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan (*annual report*) meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal periode tahun buku 2010-2012 pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI.

### **3.5. Teknik Analisa Data**

#### **3.5.1. Uji Asumsi klasik**

Uji Asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi penelitian yang dilakukan normalitas, autokorelasi, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas terhadap masing-masing faktor.

##### **1. Uji Normalitas**

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi kedua variabel yang ada yaitu variabel bebas dan terikat mempunyai distribusi data yang normal atau mendekati normal (Ghozali, 2005), alat analisis yang digunakan dalam uji ini adalah histogram dan metode normal *probability* plot yang membandingkan distribusi

kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusf kumulatif dari distribusi normal.

Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plating data akan membandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

Alat analisis lain yang digunakan adalab dengan alat uji *KolmogrovSmirnov*. Alat uji ini diganakan untuk memberikan angka-angka yang lebih detail untuk menguatkan apakah terjadi normalitas atau tidak dari data-data yang digunakan. Normalitas terjadi apabila hasil dari uji *Kolmogrov-Smirnov* lebih dari 0,05 (Ghozali; 2005)

## 2. Uji Autokorelasi

Autokorelasi timbul karena observasi berurutan sepanjang waktu tertentu yang berkaitan satu dengan yang lain. Uji autokorelasi bertujuan uutuk mengetahui apakah dalam model regresi linear bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear terdapat koreksi antara pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode sebelumnya (t-1) (Ghozali, 2005).Alat analisis yang digunakan adalah uji Durbin-Watson. Terjadi atau tidaknya autokorelasi bisa diketahui dengan membandingkan nilaistatistik hitung Durbin-Watson: Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut .

- a. Jika  $0 < DW < DI$ ;, maka terjadi autokorelasi positif
- b. Jika  $DL < DW < DU$ , maka ragu-ragu terjadi autokorelasi

- c. Jika  $DU < DW < 4 - DU$ . Maka tidak terjadi autokorelasi
- d. Jika  $4 - DU < DW < 4 - DL$ , maka ragu-ragu terjadi autokorelasi
- e. Jika  $DW > 4 DL$ , maka terjadi autokorelasi negatif

**Gambar 3.1**

Autokorelasi	Tanpa Kesimpulan	Tidak Ada Autokorelasi	Tanpa Kesimpulan	Autokorelasi Negatif
DL	DU	4-DU	4-DL	

Keterangan : DL = batas bawah DW

DU = batas atas DW

### 3. Uji Heterokedastisitas

Menguji apakah model regresi terdapat ketidaksamaan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dengan melihat grafik plat antara nilai-nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residual SRESID. Selain itu, untuk mendukung hasil grafik plot yang ada, maka dilakukan uji Glejser. Uji ini dilakukan dengan meregres nilai absolut residual terhadap variabel bebas (Ghozali, 2005): Jika variabel bebas signifikan secara statistik mempengaruhi variabel terikat, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Uji Glejser persamaannya sebagai berikut :

$$|U_t| = \alpha + \beta x_t + V_i$$

$U_t$  = Variabel residual

$V_i$  = Variabel kesalahan

#### 4. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas persamaan regresi berganda diartikan korelasi antara variabel bebas yang satu dengan variabel bebas yang lain untuk mengetahui apakah ada korelasi antara variabel-variabel bebas yang ada, maka perlu dilihat nilai korelasi parsial antarvariabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antarsesama variabel bebas sama dengan nol (Ghozali, 2005). Variabel yang menyebabkan multikolinieritas ditunjukkan dengan nilai toleransi yang lebih kecil dari 0,1 (Nilai *tolerance* < 0,1) atau nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) yang lebih besar daripada 10 (VIF > 10) (Hair et al, 1992). Jika *tolerance value* > 0,10 dan VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinieritas.

#### 3.5.2. Analisis Regresi Berganda

Teknik analisis yang digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian ini adalah dengan menggunakan Regresi berganda dengan satu variabel dependen dan lima variabel independen. Selain itu dalam penelitian juga berusaha melihat tentang gambaran umum mengenai obyek penelitian terutama berkaitan dengan informasi yang lebih mendalam tentang kondisi dari setiap variabel. Model penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$\text{ROE} = a + b_1 \text{UDK} + b_2 \text{KOMINDEP} + b_3 \text{UDD} + b_4 \text{KEPINT} + e$$

### 3.5.3. Pengujian Hipotesis

- a. Uji F digunakan untuk menguji hipotesis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Jika signifikansi F lebih kecil dari taraf signifikansi 5% maka variabel independen berpengaruh signifikan secara bersama-sama. Sebaliknya jika nilai signifikansi F lebih dari taraf signifikansi 5% maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan.
- b. Uji t adalah untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Jika signifikansi t lebih kecil dari taraf signifikansi 5% maka variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikatnya. Jika signifikansi t lebih besar dari taraf signifikansi 5% maka variabel bebas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikatnya.
- c. Uji R square (adjusted  $R^2$ ) untuk mengetahui sampai seberapa besar prosentase variasi variabel bebas pada model dapat diterangkan oleh variabel terikat (Ghozali, 2001). Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah di antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil atau di bawah 0,5 berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Sebaliknya nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.